

SINOPSIS

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan dimulainya orde Reformasi, saat ini terlihat mulai bangkit dengan harapan baru menuju arah perbaikan, salah satunya adalah tentang peraturan hubungan pusat dan daerah yang diatur melalui UU No 32 /2004, maka ketika orde baru berkuasa, keseluruhan peraturan dan pengelolaan daerah tersentralistik. Oleh karena itu, UU yang mengatur Hubungan Pusat pun masih terlihat belum sempurna, maka dari itu, lahir sebuah kebijakan untuk mengatur dan mengukur tingkat kemampuan suatu daerah, kebijakan tersebut adalah dengan dikeluarkannya PP No 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 04 Februari 2008 lalu, dimana didalamnya terdapat 3 Evaluasi dan salah satunya adalah tentang Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah atau EKPOD. Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam prosesi otonomi daerah, tentu saja tidak mau haruslah mengikuti segala bentuk perubahan yang terjadi.

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif historis, dengan jenis data sekunder atau yang diperoleh dari Dokumentasi dan juga studi pustaka. Sedangkan Unit Analisa Datanya adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo didalam melaksanakan Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah tahun 2008. Teknik Pengumpulan data yang penulis peroleh dari studi pustaka dan dokumentasi dari BPS Kabupaten Kulon Progo dan Kab. Kulon Progo) serta data dari Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

Didalam Perjalanannya, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kegigihannya dalam memperbaiki daerah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya peningkatan dari tiga aspek yang penulis teliti yaitu: kondisi kesejahteraan masyarakat, Salah satu indikatornya adalah pencapaian GNP/kapita/tahun pada tahun 2008 meningkat 13,56 %. begitupun dibidang edukasi seperti meningkatnya kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan yang ditamatkan. Aspek pelayanan umum yang meningkat diantaranya adalah: dibidang kesehatan meningkatnya jumlah Dokter dan Dokter serta meningkatnya Angka Harapan Hidup. Sedangkan aspek daya saing daerah indikator yang meningkat adalah: konsumsi pengeluaran rumah tangga perkapita dan non pangan perkapita dan daya pasang telepon. Tetapi ada juga yang menurun yaitu status balita kurang gizi dan gizi buruk meningkat ditahun 2008, Garis Kemiskinan meningkat serta angka Kriminalitas meningkat. Aspek pelayanan umuyang meningkat adalah: Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Dapat disimpulkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Kulon Progo sudah menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian, Pemerintah haruslah terus berupaya meningkatkan aspek aspek yang mengalami penurunan seperti memberantas angka kemiskinan, Meningkatkan Status Gizi Balita, memberantas Kriminalitas dan masih banyak lagi. Kabupaten Kulon Progo mempunyai Sumber Daya alam yang subur untuk Pertanian. Oleh karena itu, pemerintah harus terus bekerja keras agar apa yang diharapkan seluruh masyarakat Kulon Progo Tercapai sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang.